FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PERATURAN BANK INDONESIA

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/14/PBI/2019 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

1. Q: Apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?
A: Penerbitan PBI merupakan respon dari Bank Indonesia terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya mengalami pemulihan sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sehingga perlu memberikan insentif bagi Eksportir, Importir, dan Bank.
2. Q: Apa saja yang diatur dalam PBI ini?
A: PBI ini mengatur perubahan selisih kurang nilai DHE, pengkreditan penerimaan DHE bagi Bank, dan penundaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan impor. Pengaturan lainnya dalam PBI No.21/14/PBI/2019 tentang DHE dan DPI yang tidak diubah oleh PBI ini dinyatakan tetap berlaku.
3. Q: Siapa saja yang diatur dalam PBI ini?
A: PBI ini mengatur Eksportir, Importir, dan Bank
4. Q: Apa saja perubahan yang diatur dalam PBI ini?
A: 1. Selisih Kurang Nilai DHE
 - a. Semula diatur:
Nilai DHE yang diterima wajib sesuai dengan Nilai Ekspor atau selisih kurang paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Dalam PBI ini menjadi:
Nilai DHE yang diterima wajib sesuai dengan Nilai Ekspor atau selisih kurang paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor.
 - b. Semula diatur:
Eksportir menyampaikan dokumen pendukung ke Bank Indonesia (BI) apabila selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Ekspor lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam PBI ini menjadi:

Eksporir menyampaikan dokumen pendukung ke Bank Indonesia (BI) apabila selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Ekspor lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan lebih besar dari 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor.

2. Pengkreditan Penerimaan DHE

a. Semula diatur:

Bank hanya dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE pada rekening Eksporir jika *Message* FTMS untuk seluruh penerimaan DHE melalui transaksi TT telah dilengkapi informasi Ekspor.

Dalam PBI ini menjadi:

Bank dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE pada rekening Eksporir jika *Message* FTMS untuk seluruh penerimaan DHE melalui transaksi TT telah dilengkapi informasi Ekspor.

b. Penambahan pengaturan dalam PBI ini:

Bank melakukan penilaian terhadap kelengkapan informasi Ekspor yang terdapat pada *Message* FTMS.

3. Sanksi Penangguhan Impor

Semula diatur:

Penaan sanksi administratif kepada Importir mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Dalam PBI ini menjadi:

Penaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Impor mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

SELISIH KURANG NILAI DHE

5. Q: Apakah selisih kurang Nilai DHE tersebut untuk seluruh Eksporir?
A: Ketentuan perubahan selisih kurang Nilai DHE berlaku untuk seluruh Eksporir yaitu Eksporir SDA dan Eksporir Non-SDA.
6. Q: Apa yang dimaksud dengan Nilai Ekspor?
A: Yang dimaksud dengan Nilai Ekspor adalah nilai ekspor *free on board* (FOB) yang tercantum pada PPE.
7. Q: Apabila Nilai DHE Eksporir memiliki selisih kurang dibandingkan dengan Nilai Ekspor secara persentase lebih besar dari 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor namun tidak melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apakah Eksporir harus menyampaikan dokumen pendukung ke BI?
A: Apabila selisih kurang Nilai DHE Eksporir dibandingkan dengan Nilai Ekspor tidak melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka Nilai DHE dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor sehingga Eksporir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung.

8. Q: Apabila Nilai DHE Eksportir memiliki selisih kurang dibandingkan dengan Nilai Ekspor lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan lebih besar dari 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor, apakah Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung ke BI?
A: Ya, apabila selisih kurang Nilai DHE Eksportir dibandingkan dengan Nilai Ekspor lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan lebih besar dari 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor maka Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung.

PENINGKREDITAN PENERIMAAN DHE

9. Q: Apa yang dimaksud pengkreditan penerimaan DHE?
A: Yang dimaksud pengkreditan penerimaan DHE adalah penerusan DHE oleh Bank yang dikirimkan dari pengirim dana untuk untung rekening penerima dana.
10. Q: Apakah Bank dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE ke rekening nasabah walaupun belum dilengkapi informasi Ekspor pada *message* FTMS?
A: Bank dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE ke rekening nasabah walaupun belum dilengkapi informasi Ekspor pada *message* FTMS apabila berdasarkan penilaian Bank pengkreditan tersebut dapat dilakukan.
11. Q: Apakah Bank dikenai sanksi oleh BI apabila melakukan pengkreditan penerimaan DHE ke rekening nasabah walaupun belum dilengkapi informasi Ekspor pada *message* FTMS?
A: BI tidak mengenakan sanksi apabila Bank melakukan pengkreditan penerimaan DHE ke rekening nasabah walaupun belum dilengkapi informasi Ekspor pada *message* FTMS

SANKSI PENANGGUHAN IMPOR

12. Q: Apa yang dimaksud sanksi administratif berupa sanksi penangguhan Impor?
A: Sanksi administratif berupa sanksi penangguhan Impor adalah pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor oleh otoritas yang berwenang di bidang kepabeanan atas dasar permintaan BI. Sanksi dimaksud dikenai bagi Importir yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan DPI setelah Importir dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
13. Q: Apakah BI tetap mengenakan sanksi administratif berupa sanksi teguran tertulis dan sanksi teguran tertulis kedua sebelum 1 Januari 2022 kepada Importir?
A: Ya, dalam rangka pengawasan atas kewajiban pelaporan DPI oleh Importir, BI tetap mengenakan sanksi administratif berupa sanksi teguran tertulis dan sanksi teguran tertulis kedua sebelum 1 Januari 2022.